

BAB II

ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL

Kekuasaan internasional Organisasi Internasional (OI) berakar dari kemampuannya untuk memandu perilaku dengan cara yang lebih langsung. Satu contoh utamanya adalah aktivitas Organisasi Internasional yang menetapkan agenda. Organisasi-organisasi tersebut sering kali mampu untuk menentukan agenda pertemuan dan konferensi yang diselenggarakan dibawah perlindungannya. Kekuasaan produktif mengacu pada peran Organisasi Internasional dalam menyusun masalah yang perlu dipecahkan. Selain itu juga, Organisasi Internasional tidak murni merupakan pelayan Negara yang bersih, mereka sering kali merupakan aktor yang kuat karena mereka adalah birokrasi yang berjanji untuk menyampaikan tujuan yang diinginkan oleh lainnya. (Sorensen, 2014)

Masalah-masalah yang sering melibatkan Organisasi Internasional dan/ atau konferensi diplomatik dalam penyelesaiannya adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Eksploitasi anak di India termasuk dalam bagian hak asasi manusia tersebut, yang kemudian menghasilkan hukum internasional tentang hak asasi manusia dengan membuat perjanjian dan mengembangkan hukum adat. Hukum yang dihasilkan mewajibkan negara memeriksa kebijakan luar negerinya dengan latar belakang hukum internasional hak asasi manusia. Dalam hal ini, aktor swasta dapat menjadi penting di kedua ujung proses ini, yang memengaruhi legislasi dan implementasi. (Forsythe, 2000)

Kesejahteraan buruh saat ini masih menjadi fokus negara ataupun organisasi internasional untuk memperhatikan kesejahteraan buruh juga batas usia minimum pekerja. Hal lain yang harus diperhatikan yakni masih banyaknya buruh anak yang tersebar di beberapa negara di dunia. Hal ini cukup

memprihatinkan karena anak dibawah umur terlibat dalam masalah ketenagakerjaan tersebut. Anak-anak yang seharusnya fokus untuk menuntut ilmu juga bermain, namun harus terlibat dalam ranah dunia pekerjaan orang tuanya. Tujuannya yaitu untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Permasalahan buruh anak di dunia belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh negara yang bersangkutan ataupun dari organisasi internasional yang fokus dalam ranah ketenagakerjaan yakni Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization. Organisasi Buruh Internasional sudah melakukan banyak cara melalui beberapa program yang dicetuskan. Program tersebut sudah mengurangi jumlah pekerja anak di dunia. Namun, belum sepenuhnya mampu untuk menghapus tingkat pekerja anak di dunia.

A. Profil Organisasi Buruh Internasional

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat.

ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri perang dunia pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial. Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan. Pada 1944, yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan-tujuan ini dengan menerapkan Deklarasi Philadelphia, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa “kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana”.

Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang

layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

ILO adalah satu-satunya badan “tripartit” PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program dan merupakan badan global yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya.

Pada tahun 1946, ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru saja terbentuk. Saat peringatan hari jadinya yang ke 50 di tahun 1969, ILO menerima hadiah Nobel Perdamaian.

Besarnya peningkatan jumlah negara yang bergabung dengan ILO selama beberapa dasawarsa setelah masa Perang Dunia ke-II telah membawa banyak perubahan. Organisasi ini meluncurkan program-program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja dan pengusaha di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Polandia, Cile dan Afrika Selatan, bantuan ILO mengenai hak-hak serikat pekerja berhasil membantu perjuangan mereka dalam memperoleh demokrasi dan kebebasan.

Tahun penting lainnya untuk ILO adalah tahun 1998, di mana para delegasi yang menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference) mengadopsi Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Prinsip dan hak ini adalah hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama serta penghapusan pekerjaan untuk anak, kerja paksa dan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Jaminan atas prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja berdasarkan deklarasi tersebut, merupakan hal penting karena jaminan ini memungkinkan masyarakat untuk menuntut

secara bebas dan atas dasar kesetaraan peluang, bagian mereka yang adil atas kekayaan yang ikut mereka hasilkan dan untuk menggali potensi mereka sepenuhnya sebagai manusia.

ILO bekerja secara aktif dengan PBB dan lembaga-lembaga multilateral lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya peluang kerja yang layak sebagai titik penting dari upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. (International Labour Organization, 2007)

Markas besar ILO terletak di Jenewa. Jenewa dipilih sebagai kota untuk markas besar ILO, setelah perang dunia pertama. Kota ini menjadi pusat gerakan perdamaian dan internasionalisme global. Selain Liga Negara-Negara (sebagai pendahulu bagi *United Nations*) dan ILO, yang menjadi agen khusus pertama dari *United Nations* pada tahun 1946. Jenewa juga merupakan lokasi markas Palang Merah dan Liga Wanita Internasional. Pada tahun 1908, asosiasi bahasa Esperanto dunia menetap di Jenewa, kemudian banyak pembicaraan damai internasional dan konferensi perlucutan senjata diadakan di kota itu karena tujuan konstitusional ILO tidak berubah selama sembilan dekade keberadaannya, organisasi harus menyesuaikan kebijakan dan programnya dengan perubahan politik, sosial, dan teknologi yang jauh jangkauannya. Fokus kegiatan ILO pada awalnya adalah perjuangan melawan pengangguran, jam kerja yang panjang, dan kurangnya kesehatan dan keselamatan di tempat kerja terutama di sektor-sektor dengan tekanan fisik tinggi, risiko kecelakaan tinggi, dan bahan berbahaya. Setelah perang dunia kedua, hubungan kerja kolektif dan dialog sosial, promosi ketenagakerjaan, dan perlakuan yang sama terhadap kelompok-kelompok buruh pindah ke garis depan untuk organisasi. (Sengenberger, 2013)

Sejak tahun 1919, ILO telah menghadapi realitas sosial baru dan tantangan terhadap visi keadilan sosialnya, dan akibatnya secara berkala memperbarui misinya. Pada akhir perang dunia kedua, Deklarasi Philadelphia memperdalam

komitmen keadilan sosial ILO dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru, menetapkan bahwa tujuan utama kebijakan sosial global adalah untuk meningkatkan kondisi kerja.

Misi keadilan sosial ILO selaras dengan faktor-faktor penentu sosial yang terkait dengan pekerjaan seperti batas waktu kerja, pencegahan pengangguran, upah layak yang memadai, perlindungan terhadap penyakit, usia tua, penyakit dan cedera yang timbul dari pekerjaan, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang setara nilai. Misi ILO juga secara implisit mengakui peran kekuasaan dengan mengakui prinsip kebebasan berserikat, khususnya untuk organisasi pekerja dan pengusaha. (Frey, 2018)

Pada awalnya ILO fokus pada keamanan manusia saja namun seiring berkembangnya zaman, ILO kemudian juga meluaskan perhatiannya ke dalam kasus-kasus lain yang menjadi alasan pembentukan ILO, yaitu:

1. Kemanusiaan. ILO didirikan sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan para pekerja/buruh, dimana para pekerja/buruh sangat tereksplotasi tanpa memperhatikan kesehatan, kehidupan keluarga dan masa depan mereka.
2. Ekonomi. Didasari sepenuhnya bahwa tuntutan yang tinggi atas kesejahteraan pekerja atau buruh bukanlah suatu hal yang menarik bagi para pengusaha karena dianggap meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing.
3. Politik. Ketidakadilan yang dialami para pekerja/buruh yang jumlahnya kian bertambah akibat industrialisasi menimbulkan konflik yang mengancam perdamaian dunia. (Sinaga, 2015)

Dalam struktur organisasi ILO memiliki 3 badan utama yang masing-masing didalamnya terdiri dari perwakilan-perwakilan dari pemerintah, pengusaha dan pekerja. Tiga badan tersebut yaitu:

1. *International Labour Conference* atau Konferensi Buruh Internasional, yang diadakan sekali dalam setiap tahunnya tepatnya pada bulan Juni di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan ini, setiap perwakilan negara memiliki hal yang sama dan dapat memberikan pendapat mereka masing-masing untuk dapat membentuk solusi.
2. *Governing Body*, merupakan badan eksekutif dari ILO. Badan ini mengadakan pertemuan 3 kali dalam setiap tahun pada masing-masing bulan Maret, Juni dan November. Dalam pertemuan ini, para anggota mendiskusikan perihal kebijakan ILO, menentukan agenda yang akan di bahas dalam Konferensi Buruh Internasional, memilih direktur umum, budget untuk pelaksanaan konferensii dan menyetujui draft program.
3. *International Labour Office* atau Kantor Buruh Internasional, merupakan sekretariat permanen ILO dimana seluruh aktivitas ILO berlangsung. Dalam kantor sekretariat ini juga terdapat berbagai macam dokumentasi seperti kebijakan-kebijakan, manajemen, reformasi, kerjasama, laporan untuk direktur jenderal, dan lain-lain. (Sinaga, 2015)

Pengadilan permanen Keadilan Internasional dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) diciptakan untuk membantu negara-negara anggota memenuhi kewajiban mereka di bawah bagan liga. Pengadilan permanen peradilan internasional didirikan untuk mempertimbangkan perselisihan yang mungkin timbul terkait penafsiran perjanjian atau pelanggaran kewajiban internasional yang dianggap berdasarkan hukum internasional. ILO dibentuk, untuk membantu negara-negara anggota memenuhi tanggung jawab sosial. Pasal 23 (a) menyatakan bahwa anggota liga akan berusaha untuk mengamankan dan mempertahankan kondisi kerja yang adil dan manusiawi untuk pria, wanita, dan anak-anak, baik di negara mereka maupun di semua negara yang memperluas hubungan komersial dan industri mereka, dan untuk tujuan itu akan membangun dan memelihara organisasi

internasional yang diperlukan, dan ILO adalah salah satu lembaga liga yang tetap menjadi IGO pusat yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan menjaga standar perburuhan internasional. (Pease, 2003)

B. Tugas dan Peran Organisasi Buruh Internasional

Tugas ILO didasari pada pentingnya menjalin kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Dialog antara pemerintah dengan kedua mitra sosial ini akan mempromosikan pembentukan konsensus dan keterlibatan demokratis mereka yang memainkan peran penting di dunia kerja.

ILO juga membantu pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja dalam menjalin hubungan ketenagakerjaan yang efektif, mengadaptasi undang-undang tenaga kerja sejalan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berubah-ubah serta memperbaiki administrasi ketenagakerjaan. Dalam mendukung dan memberdayakan organisasi pengusaha dan serikat pekerja, ILO membantu menciptakan kondisi yang mendukung dialog yang efektif dengan pemerintah dan dengan satu sama lain. (International Labour Organization, 2007)

Tugas lainnya dari ILO adalah menganalisa situasi dan penawaran yang bermasalah terhadap kerjasama teknis dengan pemerintah ketika mereka merencanakan dan melaksanakan program, termasuk menawarkan masukan dalam revisi kebijakan yang menyoroti hubungan antara pekerja anak dan tujuan utama prosespolitik. Melalui penelitian analitis yang mendalam, ILO mengidentifikasi masalah yang mungkin berakar di masyarakat, juga menawarkan ide-ide untuk mencanangkan sebuah program efektif untuk menghapuskan pekerja anak. (Okusa, 2008)

ILO memainkan peran penting dalam perang melawan Rezim Apartheid di Afrika Selatan ketika oposisi menekan pemerintah dan menyerukan standar perburuhan internasional. Selain itu, ILO juga telah mendukung gerakan

untuk kebebasan dan demokrasi di Yunani pada 1960-an, selama kediktatoran Augusto Pinochet di Chili pada tahun 1970-an, selama pemogokan oleh Solidaritas serikat buruh Polandia pada 1980-an, dan baru-baru ini di Myanmar juga ILO telah memainkan peran penting.

ILO juga berupaya mempromosikan keadilan sosial bagi orang yang bekerja di mana saja. Ini merumuskan kebijakan dan program internasional untuk membantu meningkatkan kondisi kerja dan kehidupan; menciptakan standar perburuhan internasional untuk dijadikan pedoman bagi otoritas nasional dalam menerapkan kebijakan ini; melaksanakan program kerja sama teknis yang luas untuk membantu pemerintah dalam membuat kebijakan ini efektif dalam praktiknya; dan terlibat dalam pelatihan, pendidikan dan penelitian untuk membantu memajukan upaya ini. (Departement of Public Nations, United Nations, 1995)

Dalam berbagai kesempatan dan dalam banyak hal, filosofi dan standar ILO telah menginspirasi program dan agenda politik organisasi nasional dan internasional. Contoh lain adalah model sosial Eropa dengan penekanan pada dialog sosial. Hal tersebut telah tertanam dalam kanon prinsip, nilai, dan hukum perburuhan ILO.

Pengaruh positif dalam perang melawan krisis ekonomi dan dampaknya terhadap tenaga kerja global dapat dikaitkan dengan ILO. Dalam Konferensi Perburuhan Internasional ke-1 pada tahun 1919, penciptaan lapangan kerja diadvokasi sebagai obat yang efektif melawan depresi ekonomi dan pengangguran. Namun, selama krisis ekonomi dunia pada awal 1930-an, ILO hanya mengkampanyekan langkah-langkah penciptaan lapangan kerja secara publik untuk mengurangi konsekuensi dari krisis ekonomi dunia, terlepas dari advokasi intelektual oleh ekonom Inggris yaitu John Maynard Keynes. Terutama karena oposisi dari negara-negara anggota Anglo-Saxon, kesepakatan tidak dapat dicapai pada konferensi bersama yang direncanakan untuk tahun 1931.

Kelebihan ILO adalah multidimensi. Dalam banyak hal, itu merintis secara intelektual. Dalam pembukaan konstitusi pada tahun 1919, ILO telah menanggapi persaingan lintas batas yang destruktif di pasar tenaga kerja dengan pengakuan jauh ke depan bahwa kegagalan negara mana pun untuk mengadopsi kondisi kerja yang manusiawi merupakan hambatan bagi negara lain yang ingin memperbaiki kondisi di negara mereka sendiri. (Sengenberger, 2013)

Kategori dari standar internasional bertujuan pada apa yang disebut standar teknis, dimana ILO memiliki mandat internasional. Khususnya tentang peraturan upah minimum, jam kerja, periode istirahat dan hari libur, juga tentang perlindungan pekerja dengan kebutuhan khusus, seperti wanita selama kehamilan dan setelah melahirkan, pekerja migran, pekerja rumahan, dan penduduk asli dan suku. Subjek lainnya dari standar ILO adalah pekerjaan yang menguntungkan, pengangguran dan setengah pengangguran, pelatihan dan rehabilitasi kejuruan, pengembangan bisnis, statistik tenaga kerja, layanan ketenagakerjaan, keamanan sosial, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, inspeksi ketenagakerjaan, hukum perburuhan, hubungan kerja kolektif dan arbitrase dalam perselisihan perburuhan, dan kebijakan tenaga kerja untuk industri individu dan kategori pekerjaan.

Menurut Nicolas Valticos pada tahun 1990an menyebutkan bahwa sistem pengawasan standar ILO masih menjadi model. Valticos mengungkapkan bahwa alasannya adalah fakta bahwa ILO menggabungkan dua metode dasar pengawasan, laporan berkala dan keluhan, juga fakta bahwa dalam beberapa hal dasar kebebasan berserikat itu menyediakan pengawasan bahkan tanpa adanya ratifikasi. Fakta lainnya bahwa laporan diminta dan diperiksa, bahkan pada konvensi yang tidak diratifikasi dan rekomendasi. Selain itu, ILO telah menetapkan prinsip penilaian kuasi-yudisial oleh orang-orang independen dan proses hukum yang adil juga fakta dimana bahwa ILO telah menemukan metode untuk penyelidikan di tempat dan juga telah mengembangkan metode diplomasi diam-diam. Semua aspek ini merupakan

pencapaian yang solid dan kemajuan yang signifikan di bidang pengawasan internasional dan secara umum, hukum internasional ” (International Labour Organization, 2007)